

# Korupsi dalam Film Indonesia

Rhafidilla Vebrynda

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183  
Email: dillaeswa@yahoo.com

**Abstract:** *Corruption has been rooted and institutionalized in our smallest environment. The campaign to fight corruption comes from various organizations through numerous varieties of means. This study looks at the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) campaign through a film entitled “Kita Versus Korupsi”. This study uses narrative analysis by looking at the elements of narrative, narrative structure, the analysis model of aktan and the Greimas’ semiotic square. It is found that the film narrates corruption as trouble and resistor. The various forms of corruption are narrated using the combination of techniques scene, dialogue and flashback.*

**Keywords:** *corruption, narration, movie*

**Abstrak:** *Korupsi sudah mengakar dan melembaga hingga lingkungan terkecil kita. Kampanye untuk melawannya datang dari berbagai pihak melalui beragam sarana. Penelitian ini melihat kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui film “Kita Versus Korupsi”. Menggunakan metode analisis naratif dengan melihat unsur naratif, struktur naratif, analisis model aktan dan oposisi segi empat Algirdas Greimas, penelitian ini menemukan bahwa korupsi dinarasikan sebagai gangguan dan penghambat. Film tersebut selalu menghadapi pelaku korupsi dengan pihak yang tidak korupsi secara langsung. Latar belakang pengetahuan tokoh utama tentang korupsi berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Berbagai bentuk korupsi dinarasikan dengan teknik penggabungan scene, dialog dan flashback.*

**Kata Kunci:** *film, korupsi, narasi*

Korupsi sudah menjadi masalah yang tidak asing lagi bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Tindak korupsi sudah mengakar dan melembaga sampai ke lingkungan terkecil sekalipun. Pejabat pemerintah, pegawai swasta, hingga tukang parkir pun pernah melakukan korupsi. Tak heran bila masyarakat internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia (Napitupulu, 2010, h. 5).

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa

Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, bahasa Inggris dan Prancis menyebut *Corruption*, dan dalam bahasa Belanda *Corrupti*. Menurut Andi Hamzah, dari bahasa Belanda, *Corrupti*, ini lah istilah tersebut turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi” (Irfan, 2011, h. 33). Ada beberapa definisi umum lain mengenai korupsi, yakni:

...esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode penipuan dan pencurian. ...istilah korupsi secara umum sebagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal*)

*activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu menambahkan bahwa dalam perkembangannya, dari beragam pengertian korupsi, terdapat penekanan yang dilakukan sejumlah ahli dalam mendefinisikan korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi (Semma, 2008, h. 32).

Sementara itu, berikut merupakan rumus korupsi oleh Maheka (2006, h. 15):

Korupsi

= (secara melawan hukum + mengambil hak orang lain + tujuan mewakili atau mendapat keuntungan) + ada penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan + menimbulkan kerugian negara

= pencurian + penyalahgunaan kewenangan/kepercayaan) + kerugian Negara

= penggelapan + kerugian negara

Belum lama berselang, kasus korupsi semakin mencuat melalui pemberitaan penangkapan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dalam kasus suap pilkada yang melibatkan beberapa penyelenggara pemerintahan lain. Beberapa kasus korupsi yang juga sangat gencar diberitakan antara lain kasus suap mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan Anas Urbaningrum, serta kasus korupsi wisma atlet yang melibatkan Angelina Sondakh.

Ada banyak hal yang menyebabkan kasus korupsi menjadi masalah yang tak kunjung usai. Beberapa penyebabnya antara lain, penanganan kasus yang masih setengah-setengah, tindak korupsi yang

sudah melembaga dan terstruktur, serta banyaknya alasan yang menjadikan korupsi sesuatu yang wajar.

Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian World Bank, faktor yang ikut menyumbang berlangsungnya korupsi yakni pemerintahan kolonial yang kemudian melembaga dan menjadi turun temurun (Semma, 2008, h. 38). Hal inilah yang menyebabkan korupsi sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Bahkan, Hafidhuddin mengatakan bahwa korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme (Semma, 2008, h. 33). Anehnya, banyak kalangan tidak menyadarinya. Seolah-olah korupsi itu dianggap sebagai perbuatan biasa dan wajar.

Untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia, pada 2003, didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga 2012, KPK sudah menangani 480 kasus penyelidikan, 287 kasus penyidikan, dan 222 kasus penuntutan/vonis tindak pidana korupsi (Arif, 2013, h. 3).

Pada 2012, bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII), United State Agency International Development (USAID), Cangkir Kopi,

Management System International (MSI) dan sineas perfilman Indonesia, KPK membuat sebuah film berjudul “Kita Versus Korupsi”. Film tersebut dibuat dalam rangka kampanye menumbuhkan budaya anti korupsi dan sudah diputar di tujuh belas kota di Indonesia.

Film tersebut menarik antusiasme yang tinggi dalam beberapa kali pemutarannya. Pada 28 Februari 2012, di Djakarta Theater, film ini dipuji oleh wakil presiden Budiono: “Sangat mengena. Realistis. Semua bagian film ini bagus. Saya ucapkan selamat untuk para pembuat filmnya,” (E-newsletter TI-Indonesia, 2012, h. 4).

Selain itu, Wakil Ketua KPK menyebutkan bahwa film “Kita Versus Korupsi” yang diputar di 17 kota berhasil menyedot hampir 800 ribu penonton (RIS/AF, 2013). KPK yang bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan proses produksi pesan melalui sebuah film dengan target audiens seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan bermaksud memberikan pengetahuan atau ingin mengubah kognisi audiens film tersebut mengenai korupsi.

Film diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. Lakon berarti bahwa film tersebut merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan terstruktur (Mabruri, 2013, h. 2). Film diartikan juga sebagai pranata sosial dan media komunikasi massa. Hal ini berarti bahwa film mempunyai fungsi memengaruhi orang. Pengaruh yang muncul, baik negatif maupun positif, bergantung dari pengalaman dan pengetahuan masing-masing individu. Secara umum, film adalah media komunikasi yang mampu memengaruhi cara pandang

individu yang kemudian akan membentuk karakter bangsa (Mabruri, 2013, h. 3).

Beberapa pengertian di atas menuntun kita untuk mengambil simpulan bahwa film memiliki pengaruh besar bagi audiens yang menyaksikannya. Oleh karena itu, menjadikan film sebagai media kampanye atau persuasi bagi masyarakat merupakan suatu cara yang tepat di masa sekarang ini. Namun perhatian lebih perlu kita arahkan pada proses produksi atau pesan yang ingin disampaikan film tersebut. Pertanyaan yang berpotensi muncul seperti “Apakah pesannya dapat benar-benar sampai kepada masyarakat?” dan “Apakah semua yang diinginkan pembuat film bisa juga dipahami secara utuh dan benar oleh audiensnya?”.

KPK menjadikan film “Kita Versus Korupsi” sebagai media kampanye dalam upayanya memberantas korupsi di Indonesia. Sama seperti film lainnya, film ini diharapkan dapat memengaruhi dan mengubah cara pandang masyarakat tentang korupsi. Film ini mengandung nilai-nilai yang ingin ditanamkan ke benak audiens dan representasi berbagai bentuk korupsi agar audiens dapat bersama-sama menangkap pesan yang ingin disampaikan pembuat film.

Film “Kita Versus Korupsi” merupakan sebuah film omnibus. Film yang berdurasi 1 jam 10 menit 52 detik itu terdiri dari empat film pendek dengan sutradara, pemain, dan cerita berbeda. Keempat film pendek tersebut adalah “Rumah Perkara” dengan sutradara Emil Heradi, “Aku Padamu” dengan sutradara Lasja F. Susatyo, “Selamat Siang Risa” dengan sutradara Ine

Febriyanti, dan “Psssttt... Jangan Bilang Siapa-siapa” dengan sutradara Choirun Nissa.

“Rumah Perkara” menceritakan seorang lurah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seorang pengusaha. “Aku Padamu” menceritakan tentang seorang kepala dinas yang menerima suap untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepegawaian dan tentang calo yang ada di lingkungan kantor urusan agama. “Selamat Siang Risa” menceritakan tentang kepala gudang yang hendak disuap oleh pengusaha. Sedangkan “Psssttt... Jangan Bilang Siapa-siapa” menceritakan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang guru dan kepala sekolah untuk kepentingan siswanya.

Film pendek adalah film dengan cerita yang singkat dan berdurasi pendek, biasanya di bawah enam puluh menit. Membuat film pendek jauh lebih rumit dibanding membuat film berdurasi panjang karena pesan yang dikandung film pendek itu harus sampai kepada penonton dalam durasi yang cukup pendek (Mabruri, 2013, h. 6). Menurut M. Bayu Widagdo dan Winastwan Gora (dalam Mabruri, 2013), terdapat tiga faktor utama yang mendasari pesan dapat sampai ke penonton, yakni gambar, suara, dan durasi.

Sementara itu, menurut Girard Ganette (dalam Eriyanto, 2013, h. 2), narasi merupakan representasi dari peristiwa-peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Film merupakan sebuah media narasi, seperti diungkapkan Fulton (2005, h. 47):

*As a narrative medium, film—like other narrative media: epics, novels, dramas, operas and the various media considered in this book—has established many interlocking conventions to make its storytelling comprehensible. Many of these conventions concern the unique art of editing: the splicing together of different shots to make one coherent narrative whole.*

Melihat pembangunan narasi korupsi dalam film “Kita Versus Korupsi” dapat menjadi masukan bagi akademikus dan praktisi komunikasi karena sangat jarang sebuah media independen seperti KPK menggunakan film sebagai medium kampanyenya. Terlebih film ini adalah film pendek yang proses pembuatannya akan lebih sulit dibandingkan film panjang karena tuntutan untuk menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat. Film yang tidak diputar secara komersial ini menggunakan beberapa artis terkenal guna menarik audiens dan menunjukkan kepedulian sineas perfilman Indonesia terhadap kasus korupsi yang semakin banyak di negaranya. Mengingat masih jarang film Indonesia yang mengangkat kasus korupsi dapat menambah nilai plus dalam usaha menarasikan film “Kita Versus Korupsi” ini.

Hal lain yang menarik dalam “Kita Versus Korupsi” adalah kasus korupsi yang ditampilkan tidak sebesar kasus yang biasa ditangani KPK, yaitu kasus korupsi dalam lingkungan pemerintahan atau kelembagaan yang kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat narasi korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui film “Kita Versus Korupsi” (KVK) sebagai media kampanye antikorupsinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis naratif dengan melihat struktur narasi, unsur narasi, analisis model aktan dan model oposisi segi empat Algirdas Greimas. Analisis naratif digunakan karena memiliki beberapa kelebihan (Eriyanto, 2013, h.10), yaitu, *Pertama*, analisis naratif membantu memahami produksi pengetahuan, makna dan nilai, serta penyebarannya dalam masyarakat. *Kedua*, analisis naratif membantu memahami cara penceritaan dunia sosial dan politik dalam pandangan tertentu yang kemudian dapat membantu pula mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. *Ketiga*, analisis naratif memungkinkan kita menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dalam suatu teks media. *Keempat*, analisis naratif membantu kita merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi.

Penjelasan mengenai struktur narasi yang berlaku pula dalam sebuah film dikembangkan oleh Lacey dan Gillespie dari Tzvetan Todorov (dalam Eriyanto, 2013, h. 47). Struktur tersebut menjelaskan bahwa narasi dalam sebuah film memiliki lima babak. Babak pertama merupakan babak penggambaran kondisi awal, yaitu memperlihatkan kondisi keseimbangan dan keteraturan yang ditandai dengan situasi normal dalam sebuah teks. Umumnya, babak pertama ini memperlihatkan keteraturan sebuah lingkungan atau *setting* lokasi film.

Babak kedua merupakan babak adanya gangguan terhadap keseimbangan yang ada. Babak ini ditandai dengan munculnya tokoh yang merusak kondisi normal tersebut.

Babak ketiga merupakan babak kesadaran terjadinya gangguan atau gangguan yang semakin besar. Babak ini ditandai dengan mulai dirasakannya gangguan oleh tokoh utama dalam film. Kekuatan musuh akan semakin besar dalam babak ketiga ini.

Babak keempat adalah babak upaya untuk memperbaiki gangguan. Babak ini ditandai dengan hadirnya sosok pahlawan yang berupaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Melalui babak ini, biasanya diperlihatkan sosok pahlawan atau pemeran utama dalam film digambarkan kalah terlebih dahulu. Sementara babak kelima merupakan babak pemulihan menuju keseimbangan atau babak menciptakan keteraturan kembali. Babak ini ditandai dengan keberhasilan sang pahlawan mengembalikan keteraturan atau kembali ke keadaan awal.

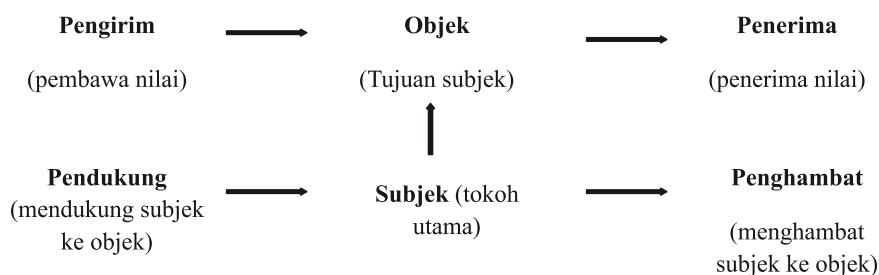
Penggunaan analisis struktur narasi ini akan menjelaskan pula hal-hal berikut, semisal pada posisi mana pembuat film menempatkan tindakan korupsi, apa kejadian yang mengawali atau mengikutinya, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi yang ada dalam film tersebut. Sedangkan analisis unsur narasi dalam film digunakan untuk menggambarkan cara pembuat film menempatkan tindakan korupsi dan melihat teknik yang digunakan pembuat film untuk memproduksi film sebagai media kampanye dalam durasi yang singkat. Melalui analisis unsur narasi ini, akan dijelaskan pula mengenai cerita dalam narasi, plot dalam narasi, dan durasi narasi. Adapun durasi dibagi lagi menjadi tiga, yakni durasi cerita, durasi plot, dan durasi teks.

Analisis ketiga yakni dengan menggunakan model aktan Algirdas Greimas. Algirdas Greimas menjelaskan bahwa dalam narasi, tiap karakter ditempatkan dalam enam posisi (Eriyanto, 2013, h. 96-97). *Pertama* adalah subjek yakni tokoh utama, *kedua* adalah objek yang merupakan tujuan dari subjek, *ketiga* adalah pengirim yakni pembawa nilai yang akan digunakan subjek dalam mencapai tujuannya. *Keempat* adalah penerima yang menerima nilai yang dibawa subjek, *kelima* adalah pendukung sebagai pembantu subjek dalam mencapai objek, dan terakhir adalah penghalang yang menghambat subjek dalam mencapai tujuan. Analisis menggunakan model aktan ini akan mengetahui di mana posisi karakter yang melakukan korupsi serta bagaimana relasinya dengan karakter lain dalam film.

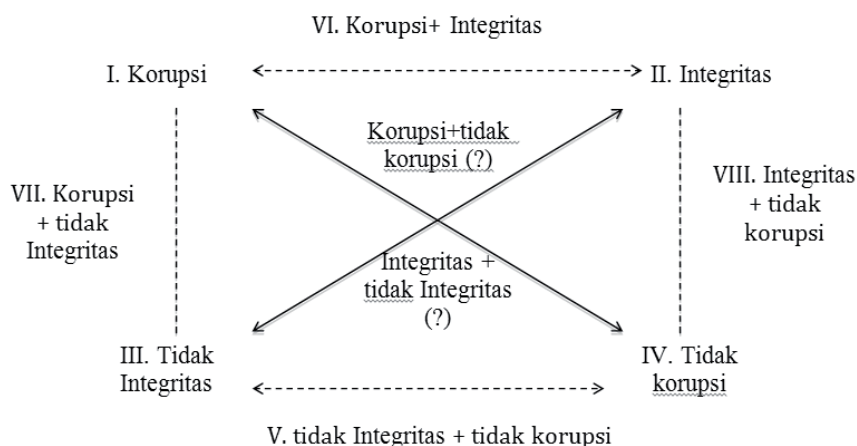
Analisis terakhir yang digunakan adalah oposisi segi empat Algirdas Greimas yang akan menjelaskan fenomena korupsi dari empat sisi. Melalui analisis model ini akan terlihat bentuk korupsi apa saja yang terdapat dalam film, bagaimana narasi dan cara *filmmaker* menarasikannya melalui film “Kita Versus Korupsi” ini. Analisis model aktan menggambarkan korupsi dapat dilihat di gambar 2.

### HASIL

Setelah melakukan analisis per bagian dalam empat metode di atas (Struktur, Unsur, Model Aktan, dan Oposisi Segi Empat), peneliti menghasilkan beberapa temuan penelitian terkait narasi korupsi dalam film Indonesia.



Gambar 1 Analisis Model Aktan dalam Film



Gambar 2 Bagan Oposisi Segi Empat Narasi Korupsi

*Pertama*, dalam hal struktur narasi, tiga dari empat film tersebut menyatakan korupsi di babak ketiga (film “Rumah Perkara”, “Selamat Siang Risa”, dan “Psssttt... Jangan Bilang Siapa-siapa”) yang merupakan babak sadar akan adanya gangguan. Pada kasus film di mana pemeran utamanya melakukan tindakan korupsi (“Rumah Perkara”), munculnya gangguan yang berupa indikasi korupsi dilanjutkan ke babak keempat dengan melakukan tindakan korupsi. Pemeran utama dalam film pertama menganggap bahwa melakukan tindakan korupsi merupakan upaya mengembalikan ke keadaan semula, meskipun pada akhirnya dia menyesal telah melakukan tindakan tersebut.

Sedangkan pada kasus pemeran utama tidak melakukan tindakan korupsi (“Selamat Siang Risa” dan “Psssttt... Jangan Bilang Siapa-siapa”), tindakan korupsi yang ada pada babak ketiga merupakan lanjutan dari indikasi yang terlihat pada babak kedua dalam film. Ini menunjukkan pemeran utama menganggap korupsi sebagai sebuah gangguan dan gangguan semakin besar yang muncul pada babak ketiga harus dihilangkan dengan melakukan cara-cara tertentu pada babak keempat, misalnya, pada “Selamat Siang Risa” dengan meyakinkan dirinya atas tindakan ayahnya dan pada “Psssttt... Jangan Bilang Siapa-siapa” dengan mengaku kalau menggunakan cara yang tidak benar untuk memperoleh keinginannya.

Berbeda dengan film kedua, “Aku Padamu”, yang hanya menempatkan tindakan korupsi di babak keempat, yakni babak upaya mengatasi gangguan. Itupun terjadi karena pihak yang hendak melakukan

korupsi adalah bukan pemeran utama dalam film. Selain itu, film kedua ini menggunakan pendekatan kisah cinta dan tidak fokus pada masalah korupsi yang dihadapi pemeran utama. Kasus korupsi dalam film kedua hanya merupakan *flashback* kehidupan tokoh utama, sedangkan porsi terbanyak dalam film diambil oleh kisah Vano dan Laras yang hendak menikah.

Meskipun diposisikan dalam babak yang berbeda, tindakan korupsi selalu diikuti dan diawali oleh penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Pengetahuan tokoh utama mengenai tindakan korupsi akan menjadi acuan bagi tindakannya dalam memutuskan akan melakukan tindakan korupsi atau tidak. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa tokoh utama dalam film yang dihadapkan pada kondisi korupsi sebenarnya menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut.

*Kedua*, dalam hal unsur narasi. Pada film pertama, korupsi dinarasikan di dalam plot film “Rumah Perkara”. Korupsi tersebut dilakukan oleh Yatna yakni dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagai lurah. Yatna yang seharusnya melindungi warganya malah menyetujui dan menandatangani proyek yang diminta oleh Jaya. Karena Yatna terdesak dan merasa punya hutang dengan Jaya, maka Yatna melakukan pemaksaan juga kepada Ella (pemaksaan dengan menggunakan wewenang yang merugikan orang yang berhak juga dikatakan korupsi, sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001). Pemaksaan kepada Ella yang berhak terhadap tanah

dan rumahnya, dilakukan Yatna untuk memenuhi keinginan Jaya, sang pengusaha yang ingin memperkaya diri. Pada film pertama, korupsi dinarasikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang lurah.

Pada film kedua, korupsi dinarasikan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan ayah Laras, kepala dinas yang menerima suap untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) menjadi guru tetap (pegawai negeri). Narasi korupsi ditempatkan dalam cerita di film kedua ini. Sedangkan indikasi korupsi ditempatkan di dalam plot yaitu saat Vano hendak memberikan sejumlah uang sebagai bentuk suap kepada calo yang memang sudah biasa melakukan tindakan korupsi. Pada film kedua, penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi narasi korupsi yang sama, ditambah dengan adanya calo di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada film ketiga, korupsi memang tidak dilakukan oleh pemeran utama, melainkan dilakukan oleh orang lain. Di dalam plot maupun cerita yang ditampilkan melalui teks, kedua-duanya tidak menerima uang suap. Korupsi dalam film ketiga ini dinarasikan sebagai pemberian hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang menjadi wewenang seorang pemilik kekuasaan, meskipun dengan melakukan tindakan melawan hukum dan memperkaya diri dan orang lain.

Pada film keempat, korupsi dinarasikan sebagai kegiatan yang melembaga. Tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, namun mulai dari siswa, guru, kepala sekolah bahkan ibu dan ayah siswa juga dinarasikan sebagai

pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi yang terjadi masih digambarkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh orang dengan kekuasaan yang lebih besar, dalam hal ini guru, kepala sekolah dan atasan, yang dapat memaksa orang lain untuk melakukan tindakan memperkaya diri dan rekayasa terhadap anggaran. Pada film keempat ini juga dinarasikan bahwa korupsi merupakan hal biasa dan sudah tidak asing lagi, bahkan pihak yang tidak melakukan tindakan korupsi pun dianggap aneh oleh orang yang melakukan korupsi.

Berdasarkan keempat film tersebut dapat disimpulkan bahwa narasi korupsi yang ditampilkan dalam film “Kita Versus Korupsi” adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, misalnya lurah, kepala dinas dan petugas KUA yang menjadi calo, serta dalam sebuah instansi, yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan seorang pengusaha yang memberikan hadiah kepada pejabat yang berwenang.

Durasi dalam keempat film tersebut menunjukkan struktur yang sama, yaitu cerita yang lebih lama dibandingkan plot serta durasi teks yang lebih singkat. Sebagaimana dalam pendahuluan yang menyatakan ada bagian yang ditekankan ada dan tidak ada, durasi teks menggunakan teknik penggabungan *scene*, *flashback* dan dialog cerita untuk menekankan bagian yang ada di dalam film. Di dalam film “Kita Versus Korupsi”, durasi teks yang tidak lebih dari dua puluh menit dianggap sudah mampu mewakili tindakan korupsi serta mampu menjadikan film ini sebagai media kampanye antikorupsi.



*Ketiga*, melalui analisis model aktan, tiga dari empat film menarasikan pelaku korupsi sebagai penghalang akan tujuan subjek, kecuali film pertama yang menjadikan pelaku korupsi sebagai subjek, meskipun dukungan untuk melakukan korupsi juga dilakukannya bersama penghalang. Pada film pertama, subjek juga menginginkan kebaikan, namun posisi yang terdesak oleh penghalang menyebabkan ia melakukan korupsi juga.

Pelaku korupsi lebih terlihat dalam *flashback*, dialog atau cerita dalam tiap teks. Sedangkan dalam plot, pelaku korupsi ditempatkan sebagai penghambat dan relasinya hampir sama, yaitu menghalangi subjek untuk mencapai keinginannya. Di dalam film, pelaku korupsi dinarasikan sebagai penghalang, berarti narasi dalam film ini mengatakan bahwa keadaan yang normal dan baik sesuai dengan yang diinginkan objek adalah hal baik yang merupakan keadaan tanpa korupsi.

Melalui latar belakang nilai-nilai yang dibawa subjek pada film kedua, ketiga, dan keempat, pelaku korupsi mampu dikalahkan oleh subjek. Di dalam hal ini, penghalang dikatakan juga sebagai pendukung tindakan korupsi. Keempat film tersebut menjadikan penghalang sebagai karakter yang menyebabkan subjek atau tokoh dalam film melakukan tindakan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di film terakhir, posisi tiap karakter tidak terisi penuh karena karakter-karakter tersebut dimainkan sendiri oleh subjek yang memang melakukan semuanya sendiri. Namun, dalam hubungannya dengan narasi

korupsi, film terakhir juga menarasikan pelaku korupsi sebagai penghalang.

*Keempat*, pada analisis dengan model oposisi segiempat, keempat film menyatakan pelaku korupsi dinarasikan dalam posisi VII, yaitu korupsi+tidak berintegritas. Pada keempat film tersebut, pelaku korupsi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mengutamakan ketidakjujuran dalam menjalankan amanah yang diembannya. Pada keempat film itu juga, narasi korupsi yang menyatakan bahwa ketika seorang melakukan korupsi yang terstruktur, maka integritasnya juga dipertaruhkan.

Sedangkan kebalikannya, pada posisi VIII, yakni berintegritas+tidak korupsi, juga selalu ada karakter yang menempati posisi tersebut dalam film. Hal ini menjelaskan bahwa sebuah oposisi menjadi cara menarasikan korupsi. Jika ada tokoh yang melakukan korupsi, maka tokoh tersebut akan dilawankan dengan tokoh jujur yang menolak tindakan korupsi. Pun dalam proses interaksinya, di setiap film, secara langsung pelaku korupsi dan pelaku yang tidak mau melakukan korupsi selalu dihadapkan.

Adapun pihak yang berada dalam posisi III (tidak berintegritas) dan V (tidak berintegritas+tidak korupsi), juga ditampilkan dalam film. Beberapa film menarasikan seseorang yang terpaksa melakukan ketidakjujuran, namun tidak berniat melakukan tindakan korupsi karena banyak hal, semisal karena desakan atau memang tidak mengetahui kalau hal tersebut sudah masuk dalam ranah korupsi, mengingat di beberapa film, korupsi dinarasikan sebagai sesuatu yang biasa.

## PEMBAHASAN

Sajian data mengenai narasi korupsi di atas menuntun peneliti untuk sampai pada pembahasan berikut. *Pertama*, berdasar strukturnya. Struktur Tzevan Torodov yang dikembangkan Lacey dan Gellispie dan yang membagi sebuah teks dalam lima babak menempatkan korupsi selalu dalam tahap gangguan. Korupsi ditempatkan sebagai sebuah gangguan dan selalu diikuti atau diawali dengan hal-hal yang menyebabkan dan akibat yang didapatkan dari tindakan korupsi tersebut. Baik melalui cerita maupun plot dalam teks, korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dinarasikan sebagai gangguan dari sebuah keadaan yang seimbang.

Di Indonesia, meskipun kasus korupsi sudah mengakar dan melembaga, pandangan mengenai pelaku tindak korupsi adalah negatif. Meskipun banyak yang melakukan tindak korupsi, semua orang sadar bahwa korupsi merupakan perbuatan yang salah dan merugikan banyak orang. Meski demikian, tak ada jaminan bahwa pengetahuan tersebut menjadi dasar tindakan yang berhubungan dengan korupsi karena pada kenyataannya masih banyak pihak melakukannya.

Meskipun diposisikan dalam babak yang berbeda, korupsi selalu diikuti dan diawali oleh penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Mengenai hal ini, Eriyanto (2013, h. 3) menyatakan bahwa sebuah narasi merupakan peristiwa yang terkait antara satu dengan yang lain dengan hubungan sebab akibat.

Secara umum, keempat film tersebut menyusun peristiwa dengan alur *flashback*,

tindakan pemeran yang akan melakukan korupsi, selalu diikuti dengan penyebab tokoh tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan korupsi. Pengetahuan tokoh mengenai korupsi dan nilai-nilai yang dipahaminya menjadi landasan sang tokoh dalam memutuskan akan melakukan tindakan korupsi atau tidak.

Melalui struktur narasi film “Kita Versus Korupsi” terlihat bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain terhubung. Struktur narasi juga memperlihatkan gambaran atau representasi yang diinginkan. Mengingat film merupakan sebuah proses produksi makna yang memperhatikan perannya dalam budaya kita (Fiske, 2012, h. 3), maka dapat disimpulkan bahwa film ini juga merepresentasikan budaya yang kita anggap wajar mengenai korupsi di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa media mengonstruksi makna pelaku korupsi sebagai penjahat dan korupsi masih merupakan hal yang tidak benar. Meskipun masih banyak pihak yang melakukan dan menganggap wajar tindak korupsi, tetap saja narasi dalam film tersebut mengatakan bahwa pelaku korupsi merupakan gangguan dan merusak keseimbangan yang ada.

Mengacu pada Klitgard (2001, h. 32) yang mengatakan bahwa definisi korupsi berubah dan Hafidhudin (dalam Semma 2013, h. 33) yang mengatakan bahwa korupsi sama jahatnya dengan terorisme dan sudah menjadi sesuatu yang wajar, maka hal ini pula lah yang terlihat dalam film. Film tersebut memperlihatkan bahwa semakin berorientasi kota dan semakin modern masyarakatnya,

ketidakjujuran dan tindakan korupsi juga semakin wajar.

Berdasarkan *setting* waktu yang semakin lama semakin modern, tindakan ketidakjujuran dan indikasi korupsi juga semakin kentara dan semakin terlihat kewajarannya. Jika pada 1970-an, di dalam film, korupsi masih sangat memalukan dan dilakukan sembunyi-sembunyi sampai ke rumah-rumah, pada 2000-an film semakin terang-terangan menampilkan tindakan korupsi, bahkan di akhir film justru dibenarkan. Dua dari empat film tersebut justru mengatakan bahwa korupsi dijadikan cara untuk kembali ke keadaan yang seimbang. Hal ini merupakan representasi dari fenomena yang coba disampaikan oleh si pembuat film tentang korupsi dan indikasi-indikasinya di Indonesia.

*Kedua*, berdasarkan unsurnya. Narasi korupsi yang ditampilkan dalam film “Kita Versus Korupsi” adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Di dalam film ini, pelaku korupsi adalah lurah, kepala dinas, petugas KUA yang menjadi calo, serta kepala sekolah, guru, siswa, dan seorang pengusaha yang memberikan hadiah kepada pejabat yang berwenang.

Durasi dalam keempat tersebut film menunjukkan struktur yang sama, yaitu cerita yang lebih lama dibandingkan plot dan durasi teks yang lebih singkat. Sesuai dengan kerangka teori yang menyatakan bahwa ada bagian yang ditekankan ada yang tidak, durasi teks menggunakan teknik penggabungan *scene*, *flashback* dan dialog cerita untuk menekankan bagian yang ada di dalam film. Di dalam pembagian cerita dan plot, tercantum jelas dalam plotnya,

tindakan-tindakan korupsi yang mencakup tindakan, alasan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Sedangkan bagian-bagian yang sering dinarasikan dalam film-film lain seperti tentang kehidupan, sifat, keadaan personal tokoh tidak dijelaskan dalam narasi film ini.

Pada film “Kita Versus Korupsi”, durasi teks yang tidak lebih dari dua puluh menit dianggap sudah mampu mewakili tindakan korupsi dan menjadikan film ini sebagai media kampanye antikorupsi. Hal tersebut didukung oleh teknik penggabungan *scene*, dialog dan *flashback* dari tokohnya yang dikemas dalam plot yang penuh dengan cerita penarasian korupsi.

*Ketiga*, berdasarkan karakternya dengan menggunakan analisis model aktan. Berdasarkan karakter model aktan, korupsi dalam film “Kita Versus Korupsi” selalu diposisikan sebagai penghambat. Tokoh utama atau subjek, dalam mencapai keinginannya, selalu tersangkut dengan pejabat atau pihak berwenang yang melakukan tindakan korupsi. Film ini menarasikan pelaku korupsi sebagai penghalang. Artinya, narasi dalam film ini mengatakan bahwa keadaan normal dan baik yang sesuai dengan keinginan objek adalah keadaan tanpa korupsi.

Budaya Indonesia mengenal korupsi sebagai kejahatan dan perbuatan tidak baik. Hal ini pula yang dinarasikan dalam film “Kita Versus Korupsi”, pelaku/tindakan korupsi ditempatkan sebagai penghalang dan tokoh utama dinarasikan sebagai orang baik yang tidak mau melakukan kejahatan. Budaya Indonesia yang menanamkan bahwa kejujuran itu penting dan merupakan lawan

dari korupsi juga berusaha dinarasikan. Film ini menempatkan posisinya sesuai dengan kondisi Indonesia pada zamannya atau *setting* waktu film.

Mengingat film ini merupakan media kampanye antikorupsi, maka banyak nilai-nilai kejujuran yang berusaha ditanamkan. Meskipun pada akhirnya penonton diberi keleluasaan untuk menyimpulkan dan memutuskan sendiri tindakannya, narasi film tersebut banyak menyajikan bentuk-bentuk korupsi, peluang-peluang terjadinya korupsi, nilai-nilai yang ditanamkan melalui tokoh utamanya dan porsi kekuasaan yang menjadi kekuatan tokoh untuk mengambil keputusan akan melakukan atau tidak melakukan korupsi dalam hubungannya dengan tokoh lain.

Melalui analisis model aktan, terlihat bahwa film “Kita Versus Korupsi” menarasikan pelaku korupsi (orang yang mendorong melakukan korupsi) sebagai penghalang terhadap keinginan tokoh utama (subjek) yang baik. Pelaku tindakan korupsi, dalam hubungannya dengan karakter lain, memberikan contoh buruk dan dinarasikan tidak sesuai dengan keinginan subjek.

Keempat, melihat fenomena korupsi dengan menggunakan analisis oposisi segi empat. Tokoh pelaku korupsi yang ditampilkan dalam film selalu berada di posisi VII, yakni korupsi+tidak berintegritas dan selalu dihadapkan dengan posisi VIII, yakni berintegritas dan tidak korupsi. Tokoh-tokoh lain yang terlibat dimasukkan dalam posisi V, yakni tidak berintegritas+tidak korupsi dan posisi III, yakni tidak berintegritas. Sedangkan posisi lain tidak dijelaskan dalam teks.

Di setiap film, secara langsung,

dalam interaksinya, pelaku korupsi selalu dihadapkan dengan pelaku yang tidak mau melakukan korupsi. Berdasarkan pengamatan peneliti pada beberapa film Indonesia, oposisi atau kebalikan antara sifat baik dan jahat atau hitam dan putih sebagai penggambaran tokoh memang menjadi sesuatu yang sudah umum di dalam penarasian sebuah film. Selalu ada tokoh yang dianggap baik dan jahat, disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat.

Keempat film di atas mengambil latar belakang lingkup kecil dan dekat dengan masyarakat, sehingga perlu diperhatikan kembali tingkat pendidikan antikorupsi yang dipahami masing-masing tokoh. Peneliti tidak dapat menyamaratakan pemahaman masing-masing tokoh terhadap korupsi, sehingga dalam penentuan posisi, peneliti benar-benar melihat tindakan tokoh dari *scene* dan dialog yang menunjukkan tingkat pengetahuan tokoh tentang tindak korupsi yang mereka lakukan.

Melalui analisis naratif kita dapat mengetahui bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Pada penelitian ini, pengetahuan dan makna yang dibangun mengenai korupsi disesuaikan dengan keadaan mayoritas masyarakat Indonesia sekarang, yakni menganggap korupsi itu sebagai sebuah kejahatan yang biasa dan wajar (Hafidhudin, dalam Semma, 2008, h. 33).

Di dalam film “Kita Versus Korupsi”, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu mengampanyekan antikorupsi dengan jargon “Berani Jujur Hebat” banyak menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai kejujuran kepada masyarakat. Film tersebut

diproduksi dengan pesan bahwa kejujuran juga bisa membuat kita hidup layak dan lebih tenang. Film ini, melalui narasinya, juga menegaskan kepada audiens agar tidak malu ketika berbuat jujur, sekalipun hal tersebut berbeda dari kewajaran banyak orang karena nantinya kita sendiri pula yang memperoleh manfaat dari kejujuran tersebut.

Melalui narasinya, film ini juga menjelaskan bahwa ketidakjujuran sangat dekat dengan tindakan korupsi. Selain itu, korupsi yang dilakukan di ranah pejabat pemerintahan, institusi atau pemilik kekuasaan sangat rentan terjadi. Padahal, korupsi akan mengurangi kewibawaan serta menghilangkan integritas pelaku korupsi itu sendiri serta berpotensi menimbulkan berbagai masalah lainnya.

Melalui penelitian naratif, kita dapat terbantu untuk memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dari perspektif tertentu dan hal tersebut dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Hasil penelitian narasi korupsi dalam film “Kita Versus Korupsi” ini memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia dianggap sebagai suatu masalah, gangguan, dan perbuatan keliru. Meskipun dua dari empat film menyatakan bahwa korupsi dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi tokoh utama, pada akhirnya kedua film tersebut kembali memperlihatkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Kejujuran menjadi nilai dominan yang harus dilakukan oleh orang yang baik (tokoh utama) untuk terlepas dari belenggu tindak korupsi. Film tersebut selalu menyatakan bahwa orang-orang baik --yang tidak mau

melakukan korupsi- adalah mereka yang cenderung memiliki tingkat ekonomi lebih rendah, tidak memiliki kuasa, serta tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan melaporkan tindak korupsi yang terjadi. Kalaupun menolak, mereka tetap tak berdaya menghadapi situasi yang terjadi.

Jika dikaitkan dengan fungsi lain naratif, yakni memungkinkan kita menyelidiki hal yang laten dan tersembunyi dalam teks media, serta merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi, peneliti dapat menarik simpulan bahwa dengan *setting* waktu yang berbeda, sejak tahun 1970-an hingga 2000-an, pandangan mengenai korupsi semakin berkembang. Film tahun 2000-an cenderung menampilkan korupsi, tindakan suap, dan ketidakjujuran sebagai sebuah kewajaran. Sedangkan film tahun 1970-an justru menganggap korupsi dan ketidakjujuran sebagai sesuatu yang memalukan, harus ditutupi, dan sebisa mungkin dihindari. Dilihat dari aspek *setting* lokasi, semakin mendekati daerah pedesaan, korupsi dan ketidakjujuran semakin dianggap sebagai tindakan tercela. Sedangkan di kota perbuatan seperti itu semakin dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan biasa saja.

## SIMPULAN

Film menjadi salah satu medium baru upaya kampanye. KPK menggunakan film “Kita Versus Korupsi” sebagai sarana kampanye antikorupsi. Melalui analisis struktur narasinya, film ini menarasikan korupsi sebagai gangguan dan babak sebelum atau sesudahnya merupakan penyebab dan akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan. Pada analisis unsur narasi, film ini menarasikan

korupsi sebagai tindakan yang akan dan tidak akan dilakukan seseorang berdasarkan latar belakang pengetahuan dan pengalaman mengenai korupsi yang dimilikinya. Melalui analisis model aktan, pelaku korupsi atau orang yang mengajak melakukan korupsi dianggap sebagai penghambat dalam sebuah plot di suatu teks film. Sedangkan melalui analisis oposisi segi empat, pelaku korupsi dinarasikan berada dalam posisi VII yakni korupsi+tidak berintegritas. Tokoh yang tidak melakukan korupsi berada dalam posisi VIII, berintegritas+tidak korupsi. Film ini selalu menempatkan orang yang melakukan tindakan korupsi dan orang yang menentang tindakan korupsi berhadapan secara langsung.

Penelitian ini menjelaskan pula kecenderungan yang terjadi di masyarakat dalam menghadapi korupsi. Semakin modern dan berorientasi kota suatu masyarakat, semakin mereka menganggap tindakan suap, korupsi dan ketidakjujuran sebagai tindakan yang wajar. Sebaliknya, semakin kuno dan berorientasi desa suatu masyarakat, semakin mereka menganggap korupsi sebagai hal tabu yang harus dihindari. Analisis naratif ini juga menunjukkan bahwa korupsi di kalangan pejabat pemerintahan sangat rentan terjadi. Orang yang semakin kuat dan berkuasa lebih cenderung melakukan tindakan korupsi. Film ini juga menunjukkan bahwa terjadi pembiaran atau ketiadaan perlawanan dari masyarakat ketika mengetahui korupsi terjadi dan sudah mengakar seperti sekarang ini.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat fenomena ini secara mendetail. Tidak hanya menggunakan analisis model yang telah disebut di atas, namun dapat pula

menganalisisnya dengan kajian lain, seperti analisis wacana ataupun analisis isi. Fokus penelitian dapat pula diperluas, tidak hanya terbatas pada teks filmnya, namun dapat pula menggunakan analisis khalayak untuk melihat respons atau pengaruh yang disampaikan film “Kita Versus Korupsi” ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- E-newsletter TI-Indonesia*. (2012). 8(1), 4. <[www.ti.or.id/media/documents/2013/01/07/e/-/e-newsletter\\_edisi\\_1\\_februari\\_2012.pdf](http://www.ti.or.id/media/documents/2013/01/07/e/-/e-newsletter_edisi_1_februari_2012.pdf)>
- Eriyanto. (2013). *Analisis naratif*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Fulton, H. (2005). *Narrative and media*. New York, NY: Cambridge University Press.
- RIF/AF. (2013). *KPK gelar festival film anti korupsi*. <<http://m.beritasatu.com/nasional/140322-kpk-gelar-festival-film-anti-korupsi.html>>
- Irfan, N. (2011). *Korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta, Indonesia: Amzah.
- Mabruri, A. (2013). *Manajemen produksi program acara TV: Format acara drama*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.
- Maheka, A. (2006). *Mengenali memberantas korupsi*. Jakarta, Indonesia: KPK.
- Napitupulu, D. (2010). *KPK in Action*. Jakarta, Indonesia: Raih Asa Sukses.
- Semma, M. (2008). *Negara dan korupsi*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli, A. (2013). *KPK tak lekang*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.